

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PROSEDUR PENDAFTARAN NPWP PRIBADI DAN BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JOMBANG**



**Oleh
FITRIANA 1862128**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG
2021**

**KULIAH KERJA MAGANG (KKM) PROSEDUR PENDAFTARAN NPWP
PRIBADI DAN BADAN**



Oleh :

Fitriana 1862128

Jombang, 5 Januari 2022

Mengetahui
Pendamping Lapangan



Andika Darma Saputra

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Benih Hartanti, SE., MBA

Mengesahkan
Ketua Program Studi



Dra. Rachyu Purbowati, MSA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Kuliah Kerja Magang sebagai salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam menempuh mata kuliah Kuliah Kerja Magang (KKM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang. Laporan Kuliah Kerja Magang ini berjudul “Prosedur Pendaftaran NPWP Pribadi dan Badan”. Tujuan dibuatnya laporan magang ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Magang ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu sebagai berikut :

1. Bapak Abd. Rohim, SE., M.Si selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang dan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM).
2. Ibu Dra. Rachyu Purbowati, MSA selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Ibu Benih Hartanti, SE., MBA selaku Dosen Pembimbing selama Kuliah Kerja Magang (KKM).
4. Bapak Andika Darma Saputra selaku Pendamping Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang yang telah membimbing selama proses Kuliah Kerja Magang.
5. Bapak Ahmad Hasan Su'aidy selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang
6. Bapak Agus Kisworo selaku Kepala Bagian Rumah Berkas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang
7. Orang Tua yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga.
8. Teman-teman seperjuangan magang di KPP Pratama Jombang yang telah menemani dan saling mendukung untuk melewati masa magang dengan semangat.

Karena kebaikan semua pihak yang telah disebutkan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan sebaik-baiknya. Laporan Kuliah Kerja Magang ini memang masih jauh dari kesempurnaan, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar hasil laporan Kuliah Kerja Magang ini berguna bagi semua pihak.

Jombang, 5 Januari 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jung' or similar, written in a cursive style.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	11
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	11
1.3.1 Bagi Mahasiswa	11
1.3.2 Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang	12
1.3.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang	12
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	12
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG	15
2.1 Profil Perusahaan	15
2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak	15
2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak	16
2.1.3 Tujuan	16
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	19
2.3.1 Sasaran	19
2.3.2 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	19
2.3.3 Kebijakan	19
2.3.4 Wilayah Kerja	20
2.3.5 Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan	20
BAB III. PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	21
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang	21
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang	21
3.2.1 Pelaksanaan Kerja yang Dilakukan di Tempat Magang	21

3.2.2 Kendala yang Dihadapi.....	23
3.3 Landasan Teori.....	23
3.3.1 Wajib Pajak	23
3.3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	26
3.3.3 Efektivitas Situs Pajak	30
3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi.....	31
BAB IV. KESIMPULAN	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran.....	32
4.3 Refleksi Diri	33
DAFTAR PUSTAKA	34
1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang.....	A
2. Form Aktivitas Harian Magang / <i>Logbook</i>	B
3. <i>Curriculum Vitae (CV)</i>	C
4. Dokumentasi	D

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jam Kerja Kuliah Kerja Magang	20
Tabel 2. Pengelompokan Wajib Pajak	24
Tabel 3. Penelitian Terdahulu Efektivitas Situs Pajak.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang	17
Gambar 2. Sistem Arsip KPP.....	21
Gambar 3. Nomor DAFNOM	21
Gambar 4. Halaman Registrasi NPWP	27
Gambar 5. Dashboard Situs ereg pajak.....	28
Gambar 6. Email Konfirmasi NPWP.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang.....	A-1
Lampiran 2. Form Aktivitas Harian Magang / <i>Logbook</i>	B-1
Lampiran 3. <i>Curriculum Vitae (CV)</i>	C-1
Lampiran 4. Dokumentasi.....	D-1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan dengan dunia kerja tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Keduanya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Melalui pendidikan mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan secara teoritis yang dapat digunakan saat memasuki dunia kerja. Untuk dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja mahasiswa dilatih melalui adanya program Kuliah Kerja Magang atau KKM. Kuliah Kerja Magang adalah mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester akhir pada program studi S1 Akuntansi di STIE PGRI Dewantara Jombang dan merupakan kegiatan intrakurikuler terstruktur berupa kegiatan praktik kerja mahasiswa di instansi terkait dengan bidang ekonomi (khususnya akuntansi). Mahasiswa selama perkuliahan telah belajar tentang perpajakan atau pajak.

Indonesia saat ini telah menapaki fase berkembang menuju negara maju. Tentunya banyak faktor yang perlu dipersiapkan, salah satunya dari segi keuangan. Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan menghimpun dana dari dalam dan luar negeri. Salah satu pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri ialah pajak.

Kementrian keuangan mencatat jumlah wajib pajak meningkat 20 kali lipat dalam waktu 20 tahun terakhir. Pada tahun 2002 terdapat 2,59 juta wajib pajak dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 46,38 juta. Data sementara pada tahun 2021 sebanyak 49,82 juta wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan mencatat jumlah pelapor SPT tahunan sampai 30 April 2021 mencapai 12.481.644. Mencakup SPT orang pribadi dan badan. Jumlah ini meningkat 1.461.642 SPT atau 13,3% dari tahun kemarin yang hanya 11.020.002 SPT. Berdasarkan data tersebut antara wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor tidak sebanding. Hal ini sangat disayangkan karena tiap-tiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sama.

Guna mendukung terlaksananya hak dan kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak, maka setiap wajib pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Dengan adanya NPWP ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran demi kepentingan bersama.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam dunia kerja.
- b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori perpajakan selama di perkuliahan.
- c. Memahami dan memiliki peluang dalam bidang pekerjaan sesuai dengan instansi terkait.
- d. Mengenalkan dan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
- e. Sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
- f. Sebagai identitas wajib pajak

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh kemampuan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa benar-benar paham bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya.
- b. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh pada perkuliahan dengan fakta di lapangan.
- c. Mengetahui proses pelaksanaan pelayanan pajak kepada masyarakat maupun pihak terkait.
- d. Memberikan masukan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan industri dan pihak-pihak terkait.
- e. Memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa yang bersifat praktik, sehingga dapat mengantarkan mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi strata satu.
- f. Memudahkan mahasiswa yang ingin merintis bisnis

1.3.2 Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

- a. Terciptanya hubungan kerjasama antara STIE PGRI Dewantara dengan instansi terkait.
- b. Sebagai evaluasi pembelajaran langsung pada mahasiswa mengenai praktik dalam dunia perpajakan agar dapat diterapkan ketika berada ditempat kerja nantinya

1.3.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang

- a. Dapat memanfaatkan mahasiswa Kuliah Kerja Magang (KKM) sesuai kebutuhan unit kerja.
- b. Mendapatkan alternatif calon karyawan dari mahasiswa yang telah menyelesaikan Kuliah Kerja Magang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
- c. Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi maupun evaluasi mengenai situasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang.
- d. Meningkatkan prosentase angka sadar pajak
- e. Meningkatkan pendapatan negara

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan di

Nama Tempat KKM : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Alamat Perusahaan/Instansi : Jl Merdeka No 157 Candi Mulyo Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419

Telp : (0354) 861609

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang menjadi objek pilihan Kuliah Kerja Magang (KKM) karena dianggap relevan dengan bidang studi yang dipelajari selama perkuliahan yaitu Akuntansi, dimana di dalamnya mencakup bidang perpajakan. Selain itu, juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat melalui salah satu mata kuliah yang sudah ditempuh 6 SKS selama 2 semester yaitu mata kuliah Perpajakan dan Akuntansi Pajak, sehingga dapat membandingkan teori yang sudah didapatkan dengan praktik yang terjadi di

lapangan. Alasan lain yang mendasari kami memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang yaitu mempersiapkan materi-materi praktik Perpajakan untuk bekal menempuh Brevet A dan B di kemudian hari.

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) yaitu tanggal 11 Oktober sampai 30 November 2021. Adapun tahapan-tahapan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini penulis melakukan survei ke beberapa perusahaan maupun instansi untuk menanyakan apakah menerima mahasiswa magang. Dari beberapa perusahaan dan instansi yang menerima magang di tengah Pandemi *Covid-19*, kami memutuskan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai tempat Kuliah Kerja Magang (KKM). Berdasarkan ketentuan administrasi yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus, maka kami mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada Ketua Program Studi Akuntansi untuk diberikan tindak lanjut kepada Bagian Administrasi Umum. Setelah mendapatkan persetujuan, kami mengajukan surat permohonan ke Bagian Administrasi Umum untuk mendapatkan surat pengantar yang nantinya ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang.

Pada hari Kamis, 30 September 2021 kami mengajukan proposal magang disertai surat pengantar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang. Dan diterima oleh bagian kepegawaian, selanjutnya kami menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPP. Pada hari Senin, 4 Oktober 2021 kami mendapatkan konfirmasi surat jawaban atas permohonan magang melalui *whatsapp*.

2. Tahap Pelaksanaan

Mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) selama 1 bulan 3 minggu terhitung mulai tanggal 11 Oktober sampai 30 November 2021. Jadwal pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) ditentukan oleh bagian yang bertanggungjawab pada bidang yang terkait. Hari kerja efektif Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang yaitu 5 hari dimulai dari hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan ini dimulai dari mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dan selanjutnya data-data tersebut diolah untuk dijadikan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM).

BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Profil Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang merupakan kantor Pelayanan Pajak Pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak.

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal pajak melakukan pemecahan Kantor Pelayanan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang diberlakukan atau SMO (Saat Mulai Operasi) pada tanggal 01 Oktober 2018 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167.PJ.2018 tentang Penerapan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal DJP. Pembentukan KPP Pratama Jombang ini merupakan hasil pemecahan dari KPP Pratama Mojokerto. Wilayah kerja KPP Pratama Jombang meliputi 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto. Unit kantor yang semula bernama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP pada posisi eselon IV meningkat menjadi eselon III.

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang beralamat di Jalan Presiden KH Abdurahman Wahid No.157 Jombang dengan wilayah kerja Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki luas 1.159,50 KM² yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 desa atau kelurahan

2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi merupakan kerangka berpikir yang memberikan gambaran tentang identitas diri (*core values dan core purpose*) serta keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitasmelalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

" Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara "

2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi) tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan serta kebijakan Pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.1.3 Tujuan

Tujuan lembaga menggambarkan isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, disamping itu tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang adalah:

- a. Mengefektifkan mekanisme penerimaan.
- b. Memperkecil peluang penghindaran pengenaan pajak.
- c. Meminimalkan ketidakpuasan WP
- d. Meningkatkan kualitas koordinasi
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang sesuai dengan

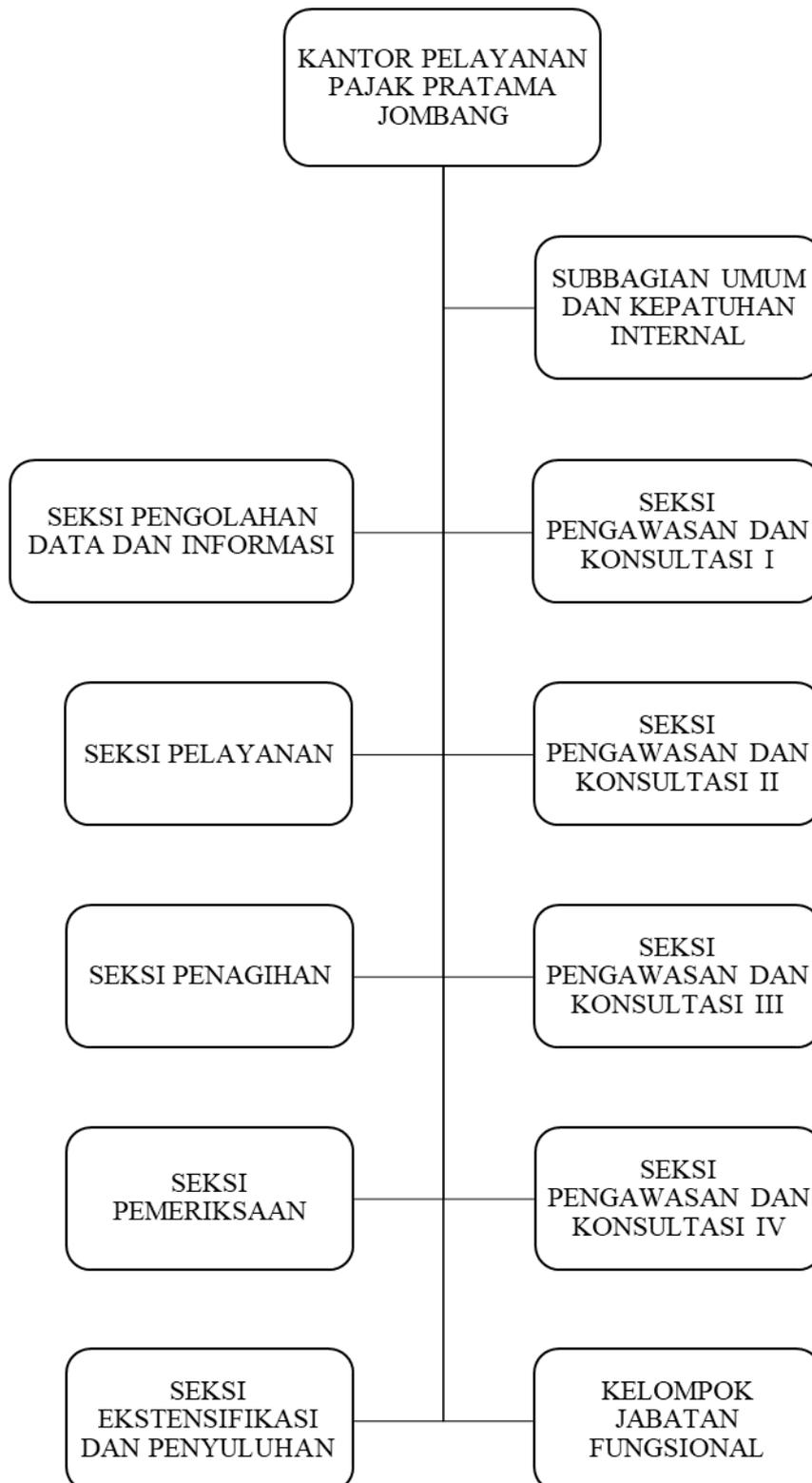
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemecahan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang diberlakukan atau SMO (Saat mulai Operasi) pada tanggal 01 Oktober 2018 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 167.PJ.2018 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal DJP.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jombang terdiri dari 10 (sepuluh) Seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan;
5. Seksi Seksi Penagihan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
10. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

2.3.1 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Sasaran yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang adalah :

- a. Tercapainya target penerimaan pajak
- b. Memperluas cakupan wilayah pendataan dan Ekstensifikasi
- c. Mewujudkan pelayanan prima
- d. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.2 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dituangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut :

2.3.3 Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kebijakan DJP yang diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan
- b. Pencapaian rencana penerimaan pajak
- c. Peningkatan pelayanan Wajib Pajak

2.3.4 Wilayah Kerja

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang beralamat di Jalan Presiden KH Abdurrahman Wahid No. 157 Jombang dengan wilayah kerja Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki luas 1.159,50 KM² yang terdiri dari 21 kecamatan dan 306 desa/kelurahan.

2.3.5 Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan

Faktor-faktor penunjang berbagai sumber daya yang ada pada suatu organisasi merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor penunjang berbagai sumber yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang, antara lain :

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Tersedianya perundang-undangan dan aturan pelaksanaan
- c. Tersedianya dana operasional yang memadai.
- d. Terjalannya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
- e. Terlaksananya pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

BAB III. PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan magang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kerja efektif dalam 1 (satu) minggu. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang memberlakukan sistem *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) kepada seluruh karyawan dan seluruh siswa/mahasiswa yang melakukan PKL/Magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang, mengingat pandemi *Covid-19* yang belum berakhir khususnya di kota Jombang.

Tabel 1. Jam Kerja Kuliah Kerja Magang

Hari Kerja	Jam Kerja	Keterangan
Senin-Jumat	08.00 – 12.00	Jam kerja
	12.00 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.30	Jam Kerja

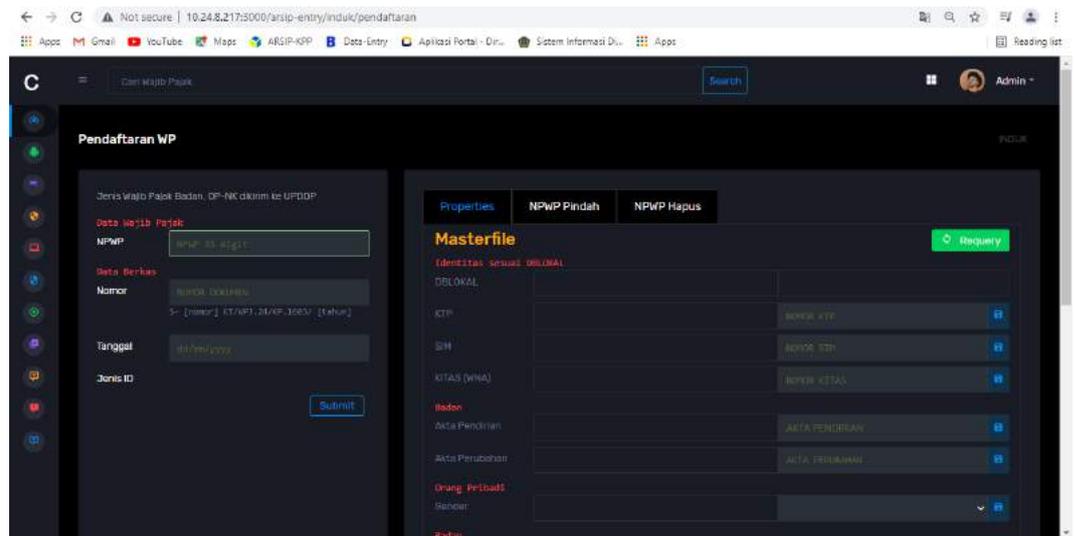
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

3.2.1 Pelaksanaan Kerja yang Dilakukan di Tempat Magang

Pada minggu pertama hari pertama saya ditempatkan di *back office* seksi pelayanan. Pada hari berikutnya sampai waktu magang saya selesai, saya ditempatkan dibagian rumah berkas KPP Pratama Jombang.

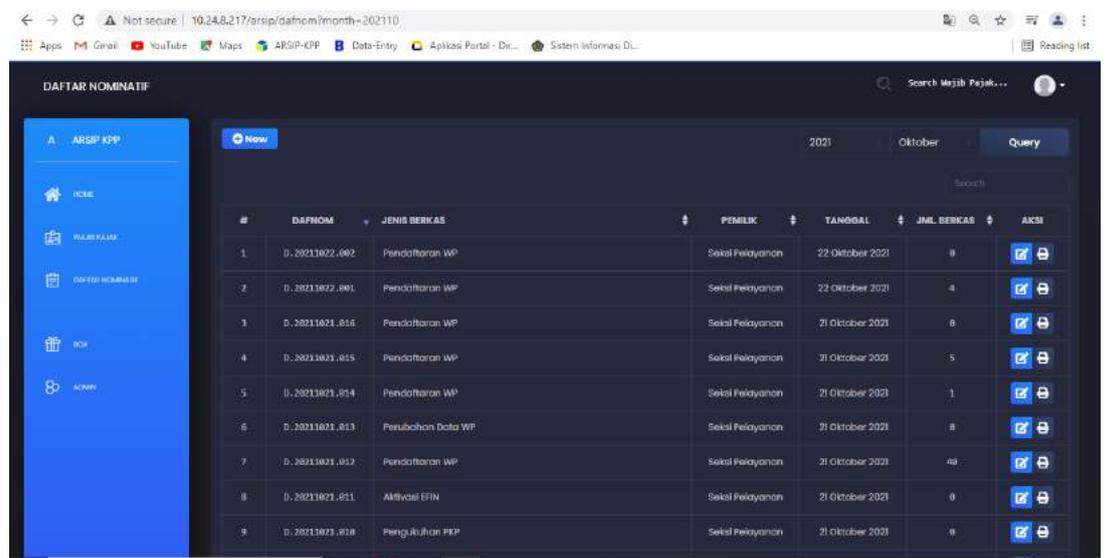
Secara rinci, pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menginput berkas daftar pengiriman SPT masa dan tahunan (E-SPT)
2. Memasukkan surat pemberitahuan perubahan data pada amplop
3. Menginput berkas pendaftaran NPWP, perubahan data Wajib Pajak dengan system ARSIP KPP



Gambar 2. Sistem Arsip KPP

4. Menginput SKT Wajib Pajak dengan system ARSIP KPP
5. Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM



Gambar 3. Nomor DAFNOM

6. Memasukkan data Wajib Pajak ke almari sesuai dengan kode yang diberikan
7. Menginput perubahan data Wajib Pajak pegawai, SKT Wajib Pajak dengan Ms. Excel
8. Mengganti map data Wajib Pajak dengan map baru
9. Memilah data Wajib Pajak orang pribadi dan badan

3.2.2 Kendala yang Dihadapi

- a. Pada bagian rumah berkas awal kami sangat sulit beradaptasi karena harus menyesuaikan dengan system yang digunakan seperti DAFNOM dan ARSIP KPP
- b. Dikarenakan ada beberapa berkas milik wajib pajak yang tidak lengkap dan berbeda-beda kami harus menganalisis berkas tersebut masuk kedalam system yang mana
- c. System yang digunakan terkadang mengalami *error* sehingga tugas yang diberikan harus tertunda
- d. Saat mengganti map dengan memilah data wajib pajak berdasarkan jenis usaha dan pekerjaan harus teliti karena berkas ditiap wajib pajak berbeda dan ada wajib pajak dengan satu nama tetapi pekerjaan dan usahanya banyak

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ONLINEPAJAK, 2018).

Menurut (Subekti, 2020)Wajib Pajak tersebut terdiri dari :

Wajib Pajak Orang Pribadi :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.

Wajib Pajak Badan :

- a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- b. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
- c. PT (Perseroan Terbatas)
- d. CV (Perseroan Komanditer)
- e. Firma.
- f. Kongsi.
- g. Koperasi.
- h. Dana Pensiun.
- i. Persekutuan.
- j. Perkumpulan.
- k. Yayasan.
- l. Organisasi Massa.
- m. Organisasi Sosial Politik.
- n. Lembaga,.
- o. Kontrak Investasi Kolektif.
- p. BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Instansi Pemerintah atau Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak :

- a. Instansi Pemerintah Pusat.
- b. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat I
- c. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II.
- d. Instansi Pemerintah Desa.
- e. BLU (Badan Layanan Umum).
- f. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak terdiri dari :

- a. Wajib Pajak Domisili atau Tunggal
- b. Wajib Pajak Pusat
- c. Wajib Pajak Cabang.
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu.

2. Pengelompokan Wajib Pajak

Tabel 2. Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak yang belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga
	Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
	Pisah Harta (PH)	Suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori Hidup berpisah dan Pisah Harta, yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
Wajib Pajak Badan	Badan	Sekumpulan orang dana atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
	Joint Operation	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi

	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
	Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaranimbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

(Direktorat Jenderal Pajak, n.d.)

3.3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Pengertian dan Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

2. Cara Memperoleh NPWP

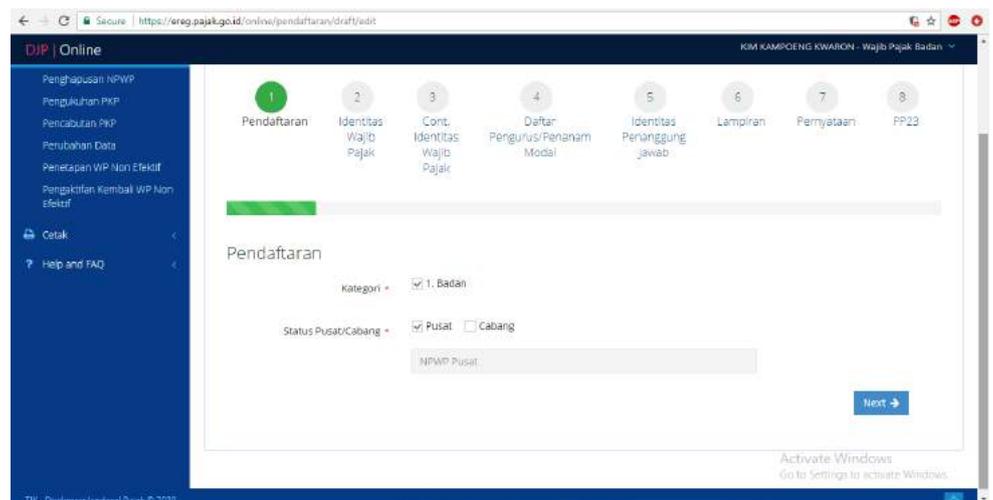
Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya atau dalam arti hak dan kewajiban perpajakan dilakukan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Dalam hal wanita kawin tersebut bermaksud melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas namanya sendiri, wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak pisah penghasilan dan harta dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dapat pula Wajib Pajak memperoleh NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratan diterima secara lengkap.

3. Syarat Pendaftaran NPWP

- a) Fotocopy KTP (WNI)
- b) Fotocopy paspor, fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbats (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk WNA

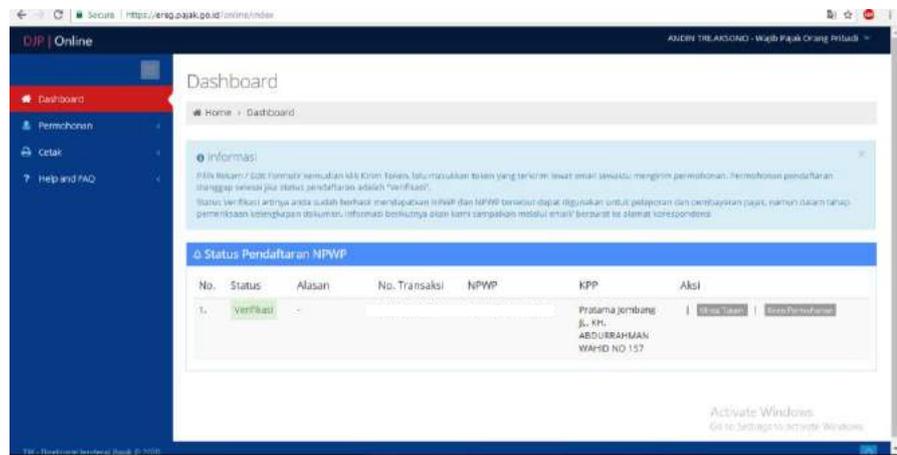
4. Tata Cara Pendaftaran NPWP

- a) Buka laman ereg.pajak.go.id
- b) Pilih menu daftar
- c) Masukkan alamat e-mail yang masih aktif dan buat password
- d) Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui e-mail untuk aktivasi akun
- e) Ikuti petunjuk yang ada di email masuk dari Ditjen Pajak
- f) Setelah proses aktivasi selesai, silahkan login ke system e-Registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat sebelumnya
- g) Setelah masuk ke halaman registrasi, isi data diri lengkap dan benar



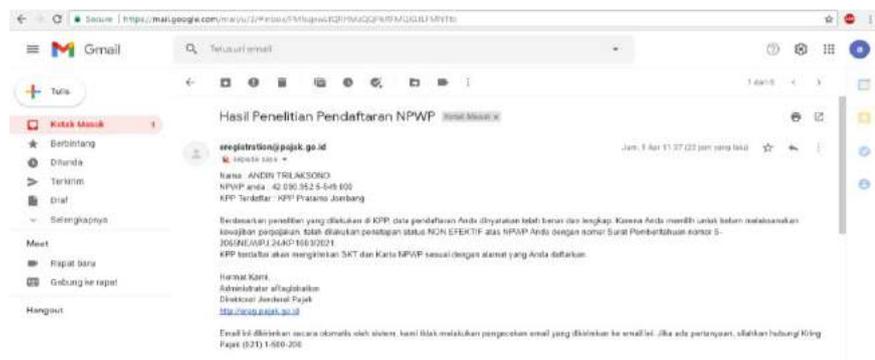
Gambar 4. Halaman Registrasi NPWP

- h) Setelah semua pengisian formulir terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi ke kantor pajak terdaftar
- i) Setelah selesai, kantor pajak akan memproses pengajuan NPWP
- j) Setelah mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard situs erag pajak. Disana pendaftar harus menekan tombol kirim token, dan harus mengisi Captcha, lalu klik submit. Konfirmasi akan dikirim melalui e-mail



Gambar 5. Dashboard Situs erag pajak

- k) Salin token yang sudah didapatkan
- l) Klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Kemudian cek email masuk untuk melihat token
- m) Jika permohonan pendaftaran NPWP disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak via pos



Gambar 6. Email Konfirmasi NPWP

3.3.3 Efektivitas Situs Pajak

Beberapa penelitian menunjukkan tentang efektivitas situs pajak milik Direktorat Jenderal Pajak diantaranya:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu Efektivitas Situs Pajak

No	Keterangan	Hasil
1	Nadira Festian Pelawi (2018) “Efektivitas Penggunaan E-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	sejak diterapkannya aplikasi- Faktur secara nasional pada Juli 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat terutama dalam pelaporan SPT masa PPN
2	A Ayudiyah Mutmainna (2016) “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan”	Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri , jenis usaha konstruksi, jenis usaha jasa, jenis usaha perdagangan tahun 2013-2015 mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak melaporkan SPT Masa PPN adalah kurang patuh
3	Zainal Arifin (2016) “Pengaruh Sistem e-Faktur Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penomoran Faktur Pajak”	Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak jenis usaha industri , jenis usaha konstruksi, jenis usaha jasa, jenis usaha perdagangan tahun 2013-2015 mengalami penurunan dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak melaporkan SPT Masa PPN adalah kurang patuh
4	Bambang Suwito (2018) “Analisis	Perusahaan siap untuk

	Potensi Dampak Penjualan dan Kesiapan Pengusaha Kena Pajak Dengan Adanya PER-31/PJ/2017 Tentang Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)(Studi Kasus PT. PANCA PUTERA CIPTA PERKASA)”	melaksanakan peraturan pemerintah mengenai perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
--	--	--

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

1. Memberi pengarahan secara langsung mengenai penggunaan sistem *e-registration* kepada wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran NPWP
2. Melakukan pendampingan kepada wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran NPWP
3. Membantu wajib pajak untuk menyiapkan dokumen pendaftaran NPWP terutama untuk wajib pajak badan.

BAB IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kuliah Keja Magang (KKM) merupakan mata kuliah wajib di dalam prodi akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan di dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan dari adanya KKM ialah untuk mengembangkan keterampilan dan etika dalam bekerja.

Selama pelaksanaan Kuliah Keja Magang (KKM) terdapat beberapa kendala, tetapi kendala tersebut dapat teratasi dengan berkonsultasi dan bertanya kepada pegawai jika memang kendala itu tidak dapat diselesaikan secara pribadi.

Hasil dari Kuliah Keja Magang (KKM) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jombang dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan salah satunya NPWP dapat dilakukan registrasi secara online melalui ereg.pajak.go.id. Sehingga memudahkan wajib pajak itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Kuliah Keja Magang (KKM) yaitu:

1. Sebaiknya disediakan telepon yang terhubung langsung dengan staf Pusat Pengelolaan Data Internal (PDI) agar lebih cepat tanggap, mengingat print yang ada pada Rumah Berkas sering kali kode print yang mengalami eror, dan tidak menghambat proses input data dan hasil data bisa langsung dimasukkan ke almari berkas.
2. Mengingat sistem ARSIP KPP yang sering eror atau sering terjadi *down*, maka sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar tidak mengganggu proses pekerjaan dalam menginput data-data dari wajib pajak.

4.3 Refleksi Diri

Dari beberapa kendala yang sering saya hadapi ditempat magang, khususnya untuk dokumen pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak memiliki dokumen pendukung yang berbeda tergantung dari profesi dan jenis usahanya. Untuk wajib pajak badan dokumen pendukung lebih banyak karena harus mencantumkan akta pendirian usaha. Dari situ saya mengerti bahwa untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak terutama badan harus mencantumkan akte pendirian usaha beserta dokumen pendukung lainnya. dan jika wajib pajak tersebut berstatus istri maka harus mencantumkan dokumen pisah harta, dsb.

Hal lain yang saya pelajari dari tempat magang ialah etika. Etika dalam dunia kerja sangatlah penting. Karena kebiasaan tersebut terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pengalaman yang saya peroleh selama magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang. Seperti mengucapkan kata tolong dan terimakasih. Selain hal tersebut manfaat lain yang saya rasakan selama magang ialah penerapan disiplin dalam mengerjakan segala sesuatu terutama yang berkaitan dengan pekerjaan. Disiplin terkait waktu dalam bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Selama magang saya ditempatkan di rumah berkas yang mengharuskan saya untuk menginput data dengan cepat tetapi teliti. Jika ada kendala seperti server eror maka sebisa mungkin berkomunikasi dengan staf dan teman magang lainnya. Hal ini sebenarnya dapat menunda pekerjaan tetapi kita diharuskan untuk menunggu sampai sistem tersebut normal kembali.

Pelajaran yang dapat saya petik semala magang ialah kunci sukses seseorang dapat didukung oleh beberapa faktor, seperti etika dan kedisiplinanya. Karena etika kita juga bisa menentukan seberapa dihargainya kita dihadapan orang lian.

DAFTAR PUSTAKA

a. Artikel dari Internet

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Wajib Pajak dan NPWP*. Retrieved from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>

KlikPajak. (n.d.). *Ketahuiilah Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Arti Kode NPWP Secara Lengkap*. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/ketahui-pengertian-fungsi-manfaat-dan-arti-kode-npwp-secara-lengkap/>.

ONLINEPAJAK. (2018, April 4). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. Retrieved from online-pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>

Sari, W. R. (2020, Januari). *Hak dan Kewajiban Pajak*. Retrieved from <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/1/9/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>

Subekti, W. (2020, Agustus 23). *Pengertian Wajib Pajak*. Retrieved from wibowopajak.com: <https://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-wajib-pajak.html>

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JOMBANG

JALAN KH. ABDURRAHMAN WAHID NO.157, CANDIMULYO, KABUPATEN JOMBANG
TELEPON (0321) 881609; FAKSIMILE (0321) 878490; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-944/WPJ.24/KP.16/2021 04 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Hal : Jawaban atas Permohonan Izin Magang

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 77 Jombang

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 696.A/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 28 September 2021 hal Permohonan Kuliah Kerja Magang dan surat nomor 696.ESTIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 28 September 2021 hal Permohonan Kuliah Kerja Magang, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Fitriana	1862128	Akuntansi
2.	Firdhatul Umrah	1862129	Akuntansi
3.	Erwin Sugiono	1861312	Manajemen

untuk melaksanakan Praktik Kerja Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang pada tanggal 11 Oktober s.d. 11 November 2021 dengan ketentuan:

1. tidak diperkenankan bagi yang bersangkutan untuk meminjam dan/atau menggandakan dokumen-dokumen yang menjadi rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
2. selama kegiatan Magang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19;
3. setelah selesai melaksanakan Magang agar mengirimkan *softcopy* laporan ke KPP Pratama Jombang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Makmur Hadi



2. Form Aktivitas Harian Magang / Logbook

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWAA / LOG BOOK

Nama : Fitriana
 NIM : 1862128
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Magang : Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jombang
 Bidang/Bagian : Bagian Rumah Berkas / Bidang Pelayanan

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	12/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan lingkungan kantor • Menginput berkas daftar pengiriman SPT masa dan tahunan (E-SPT) • Membantu memasukkan surat pemberitahuan perubahan data pada amplop 	
	14/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput perubahan data wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Menginput SKT wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM 	
II	18/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput perubahan data wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Input SKT wajib pajak dengan system ARSIP KPP 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM 	
	22/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput data pendaftaran wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM 	
III	25/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput SKT wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM 	
	27/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput perubahan data wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM 	
	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput perubahan data wajib pajak dengan system ARSIP KPP • Mencetak hasil input dengan memberi nomor DAFNOM 	
IV	01/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput perubahan data wajib pajak pegawai dengan Ms.Excel • Memasukkan data wajib pajak ke almari sesuai dengan kode yang diberikan 	
	05/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput perubahan data wajib pajak pegawai dengan Ms.Excel 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data wajib pajak ke almari sesuai dengan kode yang diberikan 	
V	11/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput SKT wajib pajak dengan Ms. Excel • Memasukkan data wajib pajak ke almari sesuai dengan kode yang diberikan 	
VI	16/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput SKT wajib pajak dengan Ms. Excel • Memasukkan data wajib pajak ke almari sesuai dengan kode yang diberikan 	
VII	24/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput SKT wajib pajak dengan Ms. Excel • Mengganti map data wajib pajak dengan map yang baru • Memasukkan data wajib pajak ke almari sesuai dengan kode yang diberikan 	
	25/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput SKT wajib pajak dengan Ms. Excel • Memilah data wajib pajak orang pribadi dna badan • Memasukkan data wajib pajak ke almari sesuai dengan kode yang 	

		diberikan	
VIII	29/11/2021	<ul style="list-style-type: none">• Input berkas Pendaftaran WP• Memasukkan berkas yang sudah ter-input ke Almari dengan diberi nomer kode	

Jombang, 30 November 2021

Pendamping Lapangan,



(Andika Dharma Saputra)

3. *Curriculum Vitae (CV)*



Data Pribadi		
Nama	:	Fitriana
Semester	:	7 (Tujuh)
NIM	:	1862128
Tempat, Tgl Lahir	:	Jombang, 21 Mei 1999
Alamat Asal	:	Dsn. Pandanwangi, Ds. Pandanwangi RT/RW 021/005 Kec. Diwek, Kab. Jombang
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
No. HP / Telp.	:	085 732 884 858
E – mail	:	anafitri820@gmail.com
Pendidikan Akhir	:	SMKN 1 Jombang

Riwayat Pendidikan			
SD	:	MI Al - Ma'ruf Beyan	(2012)
SMP	:	SMPN 1 Jombang	(2015)
SMA	:	SMKN 1 Jombang	(2018)
Perguruan Tinggi	:	STIE PGRI DEWANTARA Jombang	(2018 – sekarang)

Pengalaman Organisasi
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka
Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKU)
Relawan Pajak Tax Center Dewantara
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Pengalaman Magang dan PKL
Bank Jatim Cabang Jombang
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

4. Dokumentasi

